El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

Signifikansi Perjanjian IUAE-CEPA Terhadap Ekspor UMKM Kota Bandung dalam Kerangka Ekonomi Islam

Minhajuddin[1], Abdul Rozak[2], Untung Novianto[3], Dhenahi Jerfiani Wendiyana[4]
[1,2,3,4]Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial
[1,2,3,4]Universitas 'Aisyiyah Bandung
minhajuddin@unisa-bandung.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the potential and challenges of MSME exports KADIN Bandung City in the context of Islamic economics following the implementation of the IUAE-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). The increasingly dynamic development of economic globalization makes the role of MSMEs important as a driver of local and national economic growth. In the midst of these developments, the Islamic economic approach emerges as an alternative that has the potential to provide guidance in managing MSME exports in a sustainable manner. The urgency of this research lies in the importance of exports for MSMEs and the need for an in-depth understanding of the potential and challenges faced by MSMEs assisted by KADIN Bandung City in developing their exports after the implementation of the IUAE-CEPA Economic Agreement. By understanding these conditions, appropriate strategies and policies can be formulated to support the sustainable growth of MSME exports, especially in the context of Islamic economics. The purpose of this research is to identify the potentials that can be utilised and identify the challenges that need to be overcome by MSMEs assisted by KADIN Bandung City in expanding their export markets after the IUAE-CEPA economic agreement.

Keywords: *Exports; International Trade; Islamic economics; IUAE-CEPA; MSMEs*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan tantangan ekspor UMKM KADIN Kota Bandung dalam konteks ekonomi Islam pasca implementasi IUAE-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). Perkembangan globalisasi ekonomi yang semakin dinamis membuat peran UMKM menjadi penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Di tengah perkembangan tersebut, pendekatan ekonomi Islam muncul sebagai salah satu alternatif yang berpotensi memberikan panduan dalam mengelola ekspor UMKM secara berkelanjutan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya ekspor bagi UMKM dan perlunya pemahaman yang mendalam mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi UMKM binaan KADIN Kota Bandung dalam mengembangkan ekspornya pasca implementasi Perjanjian Ekonomi IUAE-CEPA. Dengan memahami kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekspor UMKM yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang perlu diatasi oleh UMKM binaan KADIN Kota Bandung dalam memperluas pasar ekspor mereka pasca perjanjian ekonomi IUAE-CEPA

Kata kunci: Ekspor; Perdagangan Internasional; Ekonomi Islam; IUAE-CEPA; UMKM

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian bangsa dan berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia (Faizi & Yudhistira, 2023). Salah satu indikator peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui keterlibatan aktif dalam aktivitas ekspor karena dengan pertumbuhan volume ekspor maka akan berimplikasi terhadap ekonomi nasional. Selain itu, UMKM memiliki peran yang strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi disparitas ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. UMKM juga dianggap sebagai ujung tombak Pembangunan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan berperan dalam pendistribusian hasil–hasil Pembangunan (Ahmadi, 2020). Dengan demikian, peningkatan kemampuan UMKM untuk berkontribusi dalam aktivitas ekspor tidak hanya menguntungkan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang signifikan pada tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (UU RI No 20, 2008). Pelaku UMKM dianggap sangat berjasa pada perekonomian negara ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 ketika dunia usaha lesu dan Perusahaan-perusahaan besar tidak mampu menahan gelombang krisis, maka pelaku UMKM mengambil peran dengan menjalankan ekonomi bangsa. Pada saat itu, menurut catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa UMKM menyerap tenaga kerja pada tahun 1997 yang sangat tinggi yakni 57,4 juta (87,62%), kemudian Tahun 1998 penyerapan tenaga kerja oleh pengusaha kecil kembali tertinggi yakni 57,34 juta (88,66%) (Dwiputra & Barus, 2022).

Indonesia memiliki begitu banyak pelaku UMKM baik yang terdata oleh pemerintah maupun yang belum terdapat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah UMKM mencapai 1,49 juta unit usaha (Dora et al., 2024). Secara khusus, kota Bandung merupakan daerah yang memiliki UMKM yang besar dalam bidang makanan dan minuman. Selama periode 2014 hingga 2018, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah UMKM di sektor makanan dan minuman di Kota Bandung. Pertumbuhan ini sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat, ketika berbelanja secara *online* menjadi tren utama. Dampaknya, pengusaha di industri kreatif makanan dan minuman (kuliner) mulai mengadaptasi strategi penjualan mereka. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam dunia usaha, di mana para pelaku UMKM memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing mereka (Ahmadi, 2020). Pelaku UMKM harus menyadari bahwa pola usaha sudah bergeser dari konvensional ke arah digitalisasi. Perubahan tersebut bukan pilihan tetapi jika ingin bersaing maka harus mengikuti pola dunia usaha dengan memanfaatkan digitalisasi.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

Dalam menghadapi tantangan pasar global, UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala seperti terbatasnya akses ke pasar luar negeri, peraturan perdagangan yang kompleks, dan kurangnya sumber daya untuk memasuki pasar internasional. Masalah utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dapat dibagi ke dalam dua hal yaitu masalah finansial dan masalah non finansial. Masalah finansial mencakup tidak ada pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM, biaya transaksi yang tinggi, bunga kredit untuk investasi sangat tinggi, dan banyaknya UMKM yang belum *bankable*. Masalah non-finansial antara lain kurangnya pengetahuan atas teknologi, pemasaran, *quality control* serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) (Windusancono, 2021). UMKM untuk memahami proses ekspor dan mengatasi hambatan yang ada. Salah satu lembaga yang berperan adalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin terhubung, UMKM Binaan KADIN Kota Bandung menghadapi tantangan dan peluang yang terus berkembang dalam kegiatan ekspor mereka. Salah satu peluang adalah memaksimalkan perjanjian perdagangan yang sudah diimplementasikan, salah satunya adalah perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-Comprehensive Economic Partnership Agreement (perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA) yaitu perjanjian antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab (PEA). Perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA sudah diberlakukan sejak tanggal 1 September 2023 (Kemlu.go.id, 2023). Perjanjian ekonomi tersebut memiliki ciri khas dengan memasukkan poin-poin ekonomi Islam sebagai bagian dari kerja sama yang akan dikembangkan dalam kerangka perjanjian ekonomi komprehensif.

Dalam hal mempertimbangkan perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA yang sudah diimplementasikan oleh Indonesia, maka UMKM kota Bandung dapat memanfaatkan dan memaksimalkan potensi ekspor ke PEA khususnya sektor ekonomi Islam dan berbagai kemudahan yang disepakati dalam poin perjanjian. Namun demikian, salah satu persoalan utama adalah kurangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh UMKM kota Bandung. Dalam hal ini, lembaga yang berperan dalam memberdayakan dan membangun sektor ekonomi UMKM antara lain *stakeholders*, Lembaga dunia usaha, dan lembaga keuangan dan perbankan (Windusancono, 2021). Kolaborasi antara para pihak terkait dalam rangka mendukung program UMKM akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas pelaku UMKM.

Sebelum berpartisipasi dalam bidang ekspor, maka pelaku UMKM seharusnya memahami secara komprehensif terkait ekspor baik dari segi kebijakan, prosedur serta strategi mencari pasar ekspor karena pada dasarnya, peluang UMKM untuk berperan aktif dalam bidang ekspor sangat besar. Hal ini berdasarkan pada produk UMKM Indonesia yang memiliki keunggulan dan keunikan atau nilai seni tinggi berbasis kebudayaan lokal, *handmade* dan sebagian besar telah memenuhi standar kualitas (Sidabutar, 2014).

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

Selain ini, UMKM kota Bandung menghasilkan berbagai produk ekonomi kreatif bahkan Bandung dikenal sebagai barometer ekonomi kreatif di Indonesia. Pencapaian Bandung dalam hal ekonomi kreatif sehingga tercatat sebagai anggota Unesco Creative Cities Network (UCCN) dalam kategori desain. Geliat ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM kota Bandung tentunya memiliki tantangan sehingga membutuhkan sinergi antara *stakeholders* terkait seperti pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta komunitas-komunitas penggerak ekonomi kreatif.

Dari permasalahan di atas, penelitian ini akan fokus pada tiga rumusan masalah pokok yaitu: pertama, apa saja potensi ekspor UMKM binaan KADIN kota Bandung dalam konteks ekonomi Islam pasca perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA. Kedua, tantangan yang dihadapi UMKM binaan KADIN kota Bandung dalam meningkatkan volume ekspor. Ketiga, solusi yang dapat diusulkan untuk mengoptimalkan potensi ekspor UMKM binaan KADIN kota Bandung sambil mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan implikasi dari perjanjian ekonomi internasional.

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis secara mendalam apa saja potensi yang bisa dimaksimalkan oleh pelaku UMKM binaan KADIN kota Bandung dalam rangka mengoptimalkan manfaat perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA, salah satunya dengan memanfaatkan poin ekonomi Islam sebagai peluang besar karena perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA merupakan perjanjian pertama yang memuat poin-poin ekonomi Islam. Dengan demikian, pelaku ekspor dapat memaksimalkan peluang dengan memanfaatkan perjanjian ekonomi yang sudah diimplementasikan, termasuk juga peluang UMKM binaan KADIN kota Bandung untuk memaksimalkan potensi ekspor khususnya yang berbasis ekonomi Islam. Fokus penelitian ini akan membahas peluang ekspor pada UMKM binaan KADIN kota Bandung dalam kerangka kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia dengan PEA.

Penelitian ini juga akan menganalisis tantangan yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional. Tantangan yang dihadapi dalam berbagai bentuk seperti minimnya literasi terkait pengetahuan teknis mengenai pemanfaatan perjanjian perdagangan. Proses observasi awal yang dilakukan melalui wawancara dengan *stakeholders* dari KADIN kota Bandung dan pelaku dunia usaha menunjukkan bahwa masih terlalu banyak permasalahan yang harus diselesaikan terkait peningkatan ekspor oleh para pelaku UMKM meskipun pemerintah sudah memberikan dukungan berupa perjanjian perdagangan yang bisa memperlancar proses ekspor impor.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

TINJAUAN LITERATUR

Ekonomi Islam

Hakikat ajaran Islam merupakan ajaran yang komprehensif dan tidak terfragmentasi dan bidang yang berbeda termasuk juga dalam bidang ekonomi. Pada awal perkembangan Islam, tidak dikenal adanya ekonomi Islam karena ajaran Islam merupakan satu kesatuan. Namun dinamika perkembangan dunia termasuk dalam bidang ekonomi sehingga para Pemikir Islam kemudian memperkuat ajaran Islam dengan menyusun konsep ekonomi Islam. Selain itu, terjadinya krisis yang secara berkala terjadi menjadi salah satu alasan negara dengan mayoritas penduduk Islam mengembangkan konsep ekonomi Islam (Amir, 2021).

Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam (H Muklis Bin Abdul Azis et al., 2020), ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Definisi tersebut merupakan refleksi dari berbagai fenomena yang dilihat dalam implementasi pelaksanaan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini bahwa perkembangan ekonomi Islam berlangsung ketika ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi mulai diinfiltrasi dengan sistem ekonomi sekuler yang tidak menjadikan ajaran tauhid sebagai dasar menjalankan kehidupan ekonomi. Sementara di Indonesia, ekonomi Islam baru dikembangkan pada tahun 1993 yang ditandai dengan penerapan sistem perbankan namun belum murni menggunakan perbankan syariah karena masih menggunakan *dual system banking* (Amir, 2021).

Prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang diambil dari sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis antara lain: (1) Berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat. (2) Menciptakan keseimbangan antara pribadi dan umum. (3) Terjaminnya hak individu. (4) Hak milik individu diakui oleh negara. (5) Harta hanya sebuah titipan. (6) Kewajiban membayar zakat. (7) Riba adalah haram (H Muklis Bin Abdul Azis et al., 2020).

Dalam konteks hubungannya dengan aktivitas perdagangan internasional, ekonomi Islam tidak membatasi kecuali prinsip-prinsip yang sudah ditentukan karena pada dasarnya, Islam menganjurkan untuk melakukan perdagangan sepanjang mematuhi prinsip dasar dalam ajaran Islam. Selama prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi (Wajdi & Lubis, 2021).

Dalam konteks hubungan dengan perdagangan internasional maka kedua bidang ini merupakan dua aspek penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk mengekspor barang dan jasa ke pasar global, serta mengimpor barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, sementara ekonomi Syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam menawarkan sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan (Dinata et al., 2024). Dengan demikian, pada dasarnya

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

tidak ada pertentangan antara aktivitas perdagangan internasional dengan ekonomi Islam, meskipun pada perkembangan selanjutnya, ditemukan berbagai pelanggaran konsep ekonomi Islam dalam perdagangan internasional karena konsep yang digunakan berlandaskan pada sistem ekonomi sekuler.

Perjanjian Ekonomi Komprehensif IUAE-CEPA

Secara formal, hubungan diplomatik Indonesia dengan PEA sudah berlangsung sejak tahun 1976. Namun demikian, hubungan ekonomi kedua negara tidak terlalu signifikan. Data menunjukkan bahwa periode 2012-2018, kinerja neraca perdagangan Indonesia terhadap PEA berada pada kondisi tertekan akibat besarnya defisit neraca perdagangan migas (Wahyudi & Sasongko, 2021). Pada bidang non migas, Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk memperbaiki kinerja perdagangan dengan PEA.

Hubungan Indonesia dan PEA dalam bidang ekonomi mencapai puncaknya ketika kedua negara sepakat untuk mengadakan perjanjian perdagangan internasional yang diformalisasikan dalam perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA (Wa'Uina et al., 2024). Perjanjian ini dianggap menjadi momentum Indonesia untuk memaksimalkan hubungan ekonomi dengan PEA karena tidak hanya memuat poin kesepakatan dalam bidang ekspor impor tetapi juga dalam bidang investasi, bahkan disepakati juga mengenai ekonomi Islam.

Perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2022 dan dilaksanakan secara penuh pada tanggal 1 September 2023 (moec.gov.ae, 2023). PEA mengesahkan melalui Keputusan federal nomor 178 tahun 2022 sementara Indonesia pada tanggal 12 Juli 2023, Indonesia mengesahkan melalui Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara pemerintah RI dan pemerintah Persatuan Emirat Arab. Selain sebagai perjanjian pertama Indonesia dengan negara lain yang memasukkan poin ekonomi Islam dalam kesepakatan, perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA juga merupakan perjanjian bilateral pertama Indonesia dengan negara Teluk sehingga diharapkan menjadi pintu masuk Indonesia mengoptimalkan pangsa pasar di kawasan negara-negara Teluk dan negara Timur Tengah. perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA memungkinkan Indonesia mempererat kerja sama di berbagai bidang.

Berdasarkan data dari Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Martha, 2023), cakupan perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA mencakup 19 Bab (*Chapter*) dan 8 Lampiran (*Annexes*) yang mencakup isu: (1) Perdagangan Barang. (2) Perdagangan Jasa. (3) Investasi. (4) Hak Kekayaan Intelektual. (5) Ekonomi Islam/Syariah. (6) Ketentuan Asal Barang. (7) Prosedur Kepabeanan dan Fasilitas Perdagangan. (8) Kerja sama Ekonomi. (9) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (10) Usaha Kecil dan Menengah. (11) Perdagangan Digital. (12) Ketentuan Hukum dan Isu Kelembagaan.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

Inisiasi perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA diadakan dengan dasar analisis potensi peningkatan perdagangan antara kedua negara. Pada 2021, ekspor Indonesia ke PEA tercatat sebesar USD 1,89 miliar atau meningkat 52,15 persen dibandingkan ekspor tahun 2020 yang sebesar USD 1,24 miliar. Komoditas ekspor utama Indonesia ke PEA adalah perhiasan, minyak sawit, mobil dan kendaraan bermotor, peralatan komunikasi, kain tenun sintetis, produk kertas, serta tabung dan pipa besi (Free Trade Agreement Center, 2022). Melalui perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA, diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antara kedua negara. Dengan demikian, beberapa manfaat yang diproyeksikan ke depan melalui perjanjian ini antara lain terbukanya akses pasar Indonesia ke negara PEA karena berkurangnya hambatan tarif, meningkatnya investasi PEA di Indonesia, promosi UMKM yang lebih masif, iklim investasi yang stabil dan kondusif, serta kemudahan fasilitas dan dukungan investasi PEA di Indonesia melalui *sovereign wealth fund*.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian ini yang menggambarkan relasi antar variabel yang diteliti sebagai berikut:

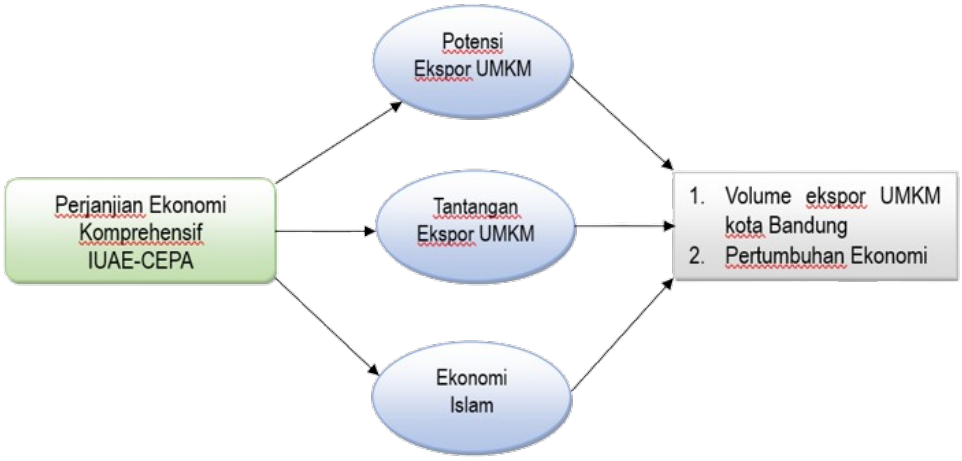

Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara wawancara mendalam dengan *stakeholders* terkait. Penelitian kualitatif menggunakan paradigma interpretif atau fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial (Murdiyanto, 2020). Metode yang digunakan melibatkan wawancara dan analisis data dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti. Proses wawancara dirancang untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam dari pelaku UMKM yang dibantu oleh KADIN Bandung dan Kepala Cabang PT. Mentari Freight Services. Dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur, peneliti dapat

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam konteks ekspor serta tantangan yang dihadapi.

Setelah data dikumpulkan, ATLAS.ti digunakan untuk melakukan analisis data hasil wawancara. Perangkat lunak ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir, mengkode, dan menganalisis data dengan efisien. Koding data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema kunci dan pola yang muncul dari wawancara. Analisis ini membantu dalam memahami potensi dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan ekspor mereka, serta bagaimana pendekatan ekonomi Islam dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja mereka di pasar global. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berbasis data untuk pengembangan strategi ekspor yang lebih efektif, yang sejalan dengan tujuan ekonomi Islam dan kebutuhan UMKM dalam menghadapi persaingan di pasar internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi UMKM Kota Bandung tentang Perjanjian Perdagangan

Perjanjian perdagangan internasional baik dalam skala bilateral, regional, dan multilateral merupakan perjanjian yang seharusnya dimaksimalkan oleh seluruh kelompok yang memiliki intensi untuk bersaing di pasar global. Tidak hanya perusahaan besar yang memperoleh keuntungan dari poin-poin kesepakatan dalam perjanjian perdagangan tetapi seharusnya juga bisa dimaksimalkan oleh pelaku UMKM khususnya UMKM yang akan menjadi pelaku eksportir. Perjanjian perdagangan berpotensi untuk membuka pasar yang lebih luas karena hambatan perdagangan direduksi bahkan dihilangkan. Peluang ini bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing produk lokal khususnya dari sektor ekonomi kreatif para pelaku UMKM. Pada akhirnya akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemampuan pelaku UMKM memanfaatkan perjanjian perdagangan secara optimal akan mendukung ekspansi UMKM dalam menghadapi tantangan di pasar global karena dengan disepakatinya perjanjian perdagangan maka arus barang masuk keluar akan semakin mudah. Kondisi ini memungkinkan terjadinya persaingan yang ketat antara produk domestik dan produk impor. Jika para pelaku UMKM tidak mampu bersaing dengan produk impor maka perjanjian perdagangan yang disepakati akan memudahkan importir mengkooptasi pasar domestik Indonesia dengan barang-barang impor.

Salah satu perjanjian perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM kota Bandung secara optimal adalah perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA yang merupakan perjanjian pertama Indonesia dengan negara Teluk. Namun pada kenyataannya, Perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA yang sudah disepakati oleh Indonesia dengan PEA ternyata masih jauh dari jangkauan pelaku

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

UMKM khususnya di kota Bandung. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor salah satunya adalah diseminasi pemahaman mengenai perjanjian perdagangan belum dilakukan secara masif oleh pihak pemerintah.

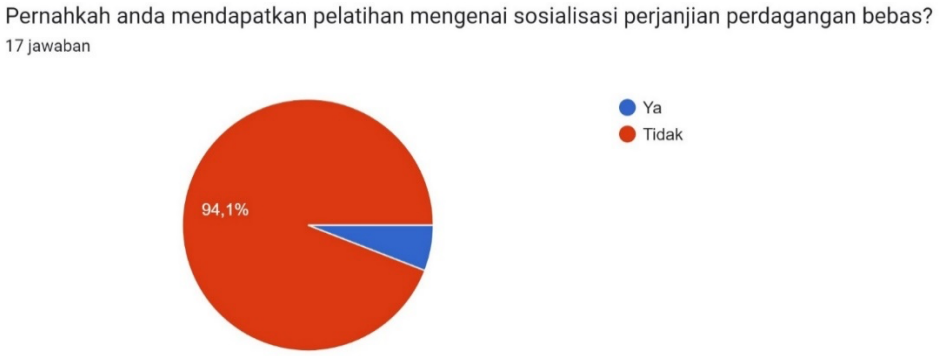

Gambar 2. Hasil Survei

Dari hasil survei di atas menunjukkan bahwa 94% pelaku UMKM binaan KADIN kota Bandung yang masuk dalam data sampling, belum pernah mengikuti sosialisasi perjanjian perdagangan. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah agar lebih masif dalam melakukan sosialisasi perjanjian perdagangan pada tataran pelaku UMKM. Kondisi ini juga terjadi karena sosialisasi perjanjian perdagangan pada umumnya ditujukan pada Perusahaan besar sementara pelaku UMKM tidak mendapat informasi mengenai perjanjian perdagangan.

Implikasi dari minimnya literasi pengetahuan perjanjian perdagangan bagi pelaku UMKM akan menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk mengakses pasar internasional. Rendahnya literasi terkait perjanjian perdagangan internasional membuat para pelaku UMKM tidak sadar akan manfaat seperti pengurangan tarif ekspor, perlindungan hukum, kesempatan bersaing di pasar global serta ketidakmampuan mengantisipasi produk impor yang bebas masuk dalam pasar domestik akibat longgarnya perdagangan internasional. Selain itu, para pelaku UMKM hanya akan terpaku pada pasar lokal.

Kurangnya sosialisasi perjanjian perdagangan internasional yang menyentuh masyarakat akar rumput termasuk pelaku UMKM harus disikapi dengan serius oleh pemerintah melalui berbagai upaya seperti melaksanakan dan menyelenggarakan pelatihan yang inklusif dan menyeluruh khususnya bagi para pelaku UMKM yang belum familiar dengan perjanjian perdagangan internasional tetapi memiliki potensi menjadi pelaku eksportir. Pemerintah juga harus memasifkan instrumen diseminasi pengetahuan perjanjian perdagangan dengan cara sosialisasi yang lebih luas dan mudah dipahami serta mudah diakses melalui platform digital, seminar terbuka, dan kerja sama dengan institusi pendidikan dan inkubator bisnis yang tersebar di setiap wilayah. Selain itu, pemerintah harus melakukan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM secara berkala untuk memastikan bahwa pelaku UMKM yang memiliki potensi menjadi eksportir mampu memahami secara teknis bagaimana

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional. Bukan hanya terkait pendampingan secara teoritis melalui seminar dan *workshop* tetapi juga dalam hal bagaimana mengurus secara teknis setiap dokumen yang diperlukan melalui bimbingan teknis. Proses seperti ini memerlukan kolaborasi antar berbagai pihak agar perjanjian perdagangan internasional yang disepakati oleh pemerintah tidak berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa.

Sejalan dengan fakta lapangan bahwa sosialisasi perjanjian perdagangan internasional belum menyentuh masyarakat akar rumput, maka berdampak pada pemahaman pelaku UMKM terkait perjanjian perdagangan yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah. Pada prinsipnya, pelaku UMKM yang belum pernah memperoleh edukasi terkait dengan perjanjian perdagangan internasional, tentunya juga memiliki pengetahuan yang minim mengenai poin-poin apa saja yang diakomodasi dalam perjanjian yang sudah diimplementasikan di lapangan. Selanjutnya, pelaku UMKM tidak mengetahui strategi pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional secara optimal.

Hal ini terjustifikasi dengan data yang ditemukan di lapangan dengan mengambil sampling pada UMKM binaan KADIN kota Bandung dengan variabel pertanyaan terkait tingkat pemahaman mereka terhadap perjanjian perdagangan internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah. Pelaku UMKM kota Bandung yang belum pernah mengikuti sosialisasi perjanjian perdagangan internasional, tidak memahami segala hal mengenai perjanjian perdagangan termasuk poin-poin perjanjian perdagangan yang memasukkan ekonomi Islam sebagai salah satu kesepakatan yang baru pertama kali disepakati dalam sebuah perjanjian perdagangan Internasional khususnya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Poin ekonomi Islam disepakati karena kedua mayoritas penduduk kedua negara adalah Muslim.

Gambar 3. Hasil Survei

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM binaan KADIN kota Bandung yang tidak memahami perjanjian perdagangan internasional mencapai 94% dari sampling yang diambil. Sampling pelaku UMKM terdiri dari pelaku UMKM yang merupakan anggota aktif KADIN kota Bandung. Pelaku UMKM tersebut aktif

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

melakukan promosi secara rutin. Kategori produknya merupakan hasil olahan makanan kering yang tentunya sangat potensial untuk bahan ekspor.

Faktor utamanya terkait dengan hasil survei awal bahwa mereka belum pernah mengikuti sosialisasi dari *stakeholders* terkait diseminasi pengetahuan mengenai perjanjian perdagangan internasional. Baik dari aspek pemahaman dasar dalam konteks apa itu perjanjian perdagangan, ruang lingkupnya, poin-poin kesepakatan yang dapat dimanfaatkan serta strategi pemanfaatan perjanjian perdagangan secara optimal agar produk domestik bisa menembus pasar global bahkan bersaing dengan produk-produk luar di pasar global. Selanjutnya, dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM binaan KADIN kota Bandung, diperoleh informasi bahwa proyeksi pemasaran hanya pada lingkup domestik karena kurangnya pengetahuan untuk memulai melakukan ekspor. Selain itu, kekhawatiran akan prosedur yang rumit serta modal yang besar jika terjun dalam usaha ekspor. Di samping itu, pelaku UMKM menyadari bahwa persaingan usaha di pasar domestik semakin berat karena terdapat produk impor yang dijual dengan harga yang sangat murah.

Tantangan dan Peluang Daya Saing Ekspor UMKM Kota Bandung

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ridwan Kurniawan, Direktur Kadin kota Bandung, menyatakan bahwa selama ini, perjanjian perdagangan internasional tidak memiliki signifikansi bagi perkembangan ekspor UMKM binaan KADIN kota Bandung karena beberapa hal antara lain: pertama, perjanjian perdagangan internasional hanya sebagai formalitas dari pemerintah yang dibuat karena adanya tuntutan dari organisasi perdagangan internasional. Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan WTO dengan otomatis harus mengikuti skema yang sudah ditetapkan dalam bentuk manifestasi perjanjian perdagangan internasional. Kedua, intensitas sosialisasi perjanjian perdagangan internasional tidak menyentuh pelaku UMKM pada akar rumput sehingga tidak mampu dimaksimalkan dengan baik. Sementara potensi Indonesia dalam mengoptimalkan perjanjian perdagangan internasional justru berasal dari para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah.

Ketiga, perjanjian perdagangan bebas hanya dimanfaatkan oleh perusahaan besar yang memiliki modal sehingga mampu memaksimalkan poin-poin yang tercantum dalam perjanjian perdagangan internasional. Keempat, terdapat masalah yang juga dialami oleh pelaku UMKM karena secara kualitas maupun kuantitas, mereka belum siap menjadi pelaku ekspor. Tentunya hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi dari pihak terkait. Perlu adanya pendampingan secara komprehensif terhadap para pelaku UMKM untuk memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional karena jika tidak mampu bersaing di pasar global, pelaku UMKM tidak akan mampu bertahan dengan membludaknya produk impor yang masuk ke pasar domestik Indonesia.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan Dani Suryana, Branch Manager PT. Mentari Freight Services, perusahaan yang bergerak di bidang *forwarding* internasional. Dari hasil wawancara juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Direktur KADIN kota Bandung bahwa perjanjian perdagangan internasional yang sudah disepakati oleh pemerintah, sangat minim berdampak pada pertumbuhan ekspor Indonesia khususnya di kota Bandung. Tren peningkatan kesepakatan perjanjian perdagangan internasional yang disepakati pemerintah tidak dirasakan oleh para *customer* dari PT. Mentari Freight Services.

Hal ini tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga perjanjian perdagangan hanya menjadi konsumsi bagi para pelaku ekspor dengan modal besar. Perjanjian perdagangan internasional sekadar formalitas dari pemerintah untuk mengikuti skema besar yang ditentukan oleh rezim perdagangan bahwa semua negara anggota harus mengikuti aturan yang sudah disepakati dengan cara mengimplementasikan perjanjian perdagangan internasional. Namun demikian, pelaku UMKM berpotensi untuk memaksimalkan manfaat yang disepakati dalam setiap perjanjian perdagangan internasional. Pemerintah harus memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM agar ke depan mampu bersaing dengan produk-produk impor yang akan mendominasi pasar Indonesia. Produk impor tidak bisa dibatasi jika mengikuti skema perjanjian perdagangan internasional yang sudah disepakati.

Hasil wawancara dengan Direktur KADIN kota Bandung dan Branch Manager PT. Mentari Freight Services digambarkan dalam diagram berikut:

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

Gambar 4. Hasil Wawancara
Sumber: Hasil Pengolahan data

Dari hasil analisis wawancara di atas, terdapat diagram konsep yang menggambarkan hubungan antar konsep. Diagram konsep tersebut yaitu pertama, *Is Associated With*, menunjukkan dua konsep atau entitas memiliki hubungan atau keterkaitan namun bukan kausalitas secara langsung. Kedua, *Is Cause Of*, menunjukkan hubungan sebab akibat di mana satu entitas atau konsep menyebabkan terjadinya yang lain. Ketiga, *Is a Property Of*, mengindikasikan satu konsep merupakan atribut atau karakteristik dari entitas yang lain. Keempat, *Contradicts*, Menunjukkan bahwa dua entitas atau konsep saling bertentangan atau memiliki perbedaan yang signifikan. Kelima, *Is Part Of*, mengindikasikan satu konsep merupakan bagian dari keseluruhan entitas atau sistem yang lebih besar. Keterkaitan antar konsep dan variabel akan dijelaskan dalam konteks tantangan dan peluang bagi pelaku UMKM kota Bandung untuk bersaing di pasar global.

Dari bagan tersebut dapat dianalisis bahwa *concept map Contradicts* menjelaskan mengenai tantangan UMKM kota Bandung untuk berperan dalam kegiatan ekspor disebabkan karena sosialisasi perjanjian perdagangan internasional yang tidak menyeluruh dilakukan di lapisan masyarakat. Sosialisasi yang minim berdampak pada ketidakmampuan pelaku UMKM memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional. Pada akhirnya, perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekspor pada produk UMKM kota Bandung. Tantangan yang dihadapi tersebut harus diperbaiki di masa depan supaya pelaku UMKM kota Bandung mampu bersaing di pasar global.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

Diagram konsep *Is Associated With*, menjelaskan tentang keterkaitan antara beberapa konsep seperti sosialisasi perjanjian perdagangan dengan literasi ekspor, pemanfaatan perjanjian perdagangan dengan pengaruh perjanjian perdagangan, perkembangan ekspor UMKM kota Bandung dengan dukungan kepada UMKM. Keterkaitan tersebut dimaksudkan bahwa ada keterkaitan sebab akibat antar konsep. Jika sosialisasi perjanjian perdagangan dilakukan dengan maksimal maka akan meningkatkan literasi ekspor di kalangan pelaku UMKM.

Diagram konsep *Is Cause Of*, menjelaskan mengenai penyebab langsung. Dalam hal ini, berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa sosialisasi perjanjian perdagangan internasional berdampak langsung terhadap pemanfaatan perjanjian perdagangan dan kesiapan UMKM dalam melakukan ekspor. Literasi ekspor yang meningkat di kalangan pelaku UMKM akan berdampak langsung pada kemampuan UMKM dalam memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional. Rencana strategis pelaku UMKM akan menghasilkan keunggulan komparatif yang berdampak pada peningkatan ekspor.

Sementara diagram konsep *Is a Property Of*, menjelaskan bahwa literasi ekspor adalah salah satu aspek atau karakteristik dari strategi yang direncanakan oleh pelaku UMKM. Dukungan bagi UMKM merupakan salah satu bagian dari peran pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM khususnya di kota Bandung. *Is Part Of*, keunggulan kompetitif adalah bagian dari potensi yang dimiliki oleh UMKM setelah adanya perjanjian perdagangan. Literasi ekspor merupakan salah satu bagian dari dukungan pemerintah kepada para pelaku UMKM kota Bandung.

Secara umum, dapat digambarkan bahwa diagram konsep *Contradicts* menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM kota Bandung dalam bersaing di pasar global, sementara diagram konsep yang lain menjelaskan hubungan kausalitas, artinya bahwa jika terdapat perbaikan pada entitas yang satu maka akan menjadi peluang bagi pelaku UMKM misalnya jika sosialisasi perjanjian perdagangan internasional dilakukan secara berkala dan menyeluruh maka akan menjadi potensi bagi pelaku UMKM untuk menjadi pelaku ekspor. Dengan demikian, perjanjian perdagangan internasional merupakan kesepakatan yang mempunyai dua sisi yang kontradiktif. Jika pemerintah tidak mampu melakukan strategi yang presisi untuk mengoptimalkan penerapan perjanjian perdagangan internasional maka akan berdampak negatif terhadap ekonomi domestik karena perjanjian perdagangan internasional melegalisasi masuknya produk impor yang akan membanjiri pasar domestik. Di samping itu, perjanjian perdagangan internasional juga bisa menjadi potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika para pelaku usaha termasuk UMKM mampu bersaing di pasar global dengan memanfaatkan kesepakatan dalam perjanjian perdagangan.

Pada dasarnya, pelaku UMKM kota Bandung memiliki potensi dalam memanfaatkan perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA karena mengakomodir poin ekonomi Islam sementara Bandung dikenal sebagai kota dengan lahirnya

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

berbagai ekonomi kreatif yang mengusung ekonomi Islam. Desain produk yang memasukkan ekonomi Islam sebagai unsur utama sangat penting sebagai nilai jual ke pasar PEA secara khusus dan ke pasar Timur Tengah secara umum. Bahkan secara berkala, Pemerintah kota Bandung berkolaborasi dengan komunitas-komunitas mengadakan *event* mengenai ekonomi kreatif yang menjadi indikator bahwa kota Bandung memiliki potensi yang sangat besar bersaing di pasar global.

Strategi Ekspor UMKM Kota Bandung

Dari identifikasi tantangan dan peluang yang sudah dielaborasi di atas, maka berbagai strategi harus dilakukan oleh UMKM kota Bandung agar menjadi pelaku utama dalam perdagangan internasional dengan memanfaatkan perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA. Kondisi perdagangan dunia yang menuntut semua negara membebaskan perdagangannya sehingga menyisakan dua pilihan bagi para pelaku UMKM yaitu menjadi pemain utama dalam perdagangan global dengan cara meningkatkan volume ekspor dalam konteks ekonomi Islam dengan memanfaatkan kemudahan melalui perjanjian perdagangan internasional. Jika tidak mampu melakukan pilihan pertama maka kemungkinan besar akan menjadi sasaran empuk banjirnya produk impor dari negara lain yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Klasifikasi strategi yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM kota Bandung dibagi dalam dua bagian yaitu internal dan eksternal. Pembagian ini untuk memperjelas bagian yang dapat dieksekusi langsung oleh pelaku UMKM dan bagian yang harus diinisiasi oleh *stakeholders*. Selain itu, pemerintah juga harus mampu melakukan sosialisasi mengenai poin ekonomi Islam yang merupakan keunggulan dari perjanjian IUAE-CEPA.

Pada aspek internal UMKM, maka strategi yang harus dilakukan antara lain peningkatan standar kualitas produk yang akan diekspor khususnya yang memuat ekonomi Islam misalnya dalam bidang kuliner maka harus memahami sertifikasi halal. Meningkatkan kualitas tentunya harus dari pelaku UMKM untuk terus berinovasi dalam hal perbaikan kualitas produk tanpa harus menunggu dukungan dari *stakeholders*. Kualitas produk mencakup desain yang menarik dan inovasi agar diterima di pasar global. Selain itu, pelaku UMKM juga harus memperkuat *branding* dan promosi untuk memasarkan produknya di pasar global. Sejalan dengan strategi *branding* dan promosi maka strategi selanjutnya adalah pelaku UMKM harus memanfaatkan secara optimal teknologi seperti platform digital*, e-commerce* dan berbagai instrumen teknologi lain untuk menembus pasar global. *E-commerce* memberikan peluang besar untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan (Hodijah et al., 2023).

Sementara itu, strategi peningkatan ekspor bagi para pelaku UMKM kota Bandung yang melibatkan aspek eksternal antara lain; pertama, pendampingan dan pelatihan yang meliputi berbagai hal termasuk edukasi, bimbingan teknis, dan strategi menembus pasar global. Kedua, Sertifikasi dan lisensi ekspor yang berkaitan dengan peningkatan daya saing produk seperti sertifikasi ISO dan sertifikasi halal

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

khususnya untuk negara tujuan yang mensyaratkan sertifikasi tertentu. Ketiga, pelaku UMKM harus melakukan kolaborasi dengan Institusi Perdagangan agar memudahkan mereka mendapatkan akses mengenai seluk beluk ekspor. Keempat, optimalisasi perjanjian perdagangan internasional. Pada aspek ini, pihak pemerintah yang harus proaktif untuk melakukan sosialisasi secara masif dan berkala kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan ekspor.

KESIMPULAN

Perjanjian ekonomi komprehensif IUAE-CEPA yang sudah diimplementasikan sejak tanggal 1 September 2023 merupakan perjanjian ekonomi komprehensif pertama yang disepakati Indonesia dengan negara Teluk yang memasukkan poin Ekonomi Islam sebagai salah satu isi dari kesepakatan. Hal tersebut melahirkan harapan bagi pemerintah untuk mampu mengekspansi pasar global tidak hanya pada pasar domestik Persatuan Emirat Arab (PEA) tidak diharapkan bahwa ekspansi pasar ekspor Indonesia juga mampu menembus negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah karena adanya kesamaan identitas dengan Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Selain itu, produk Indonesia diminati oleh negara Timur Tengah karena Indonesia kaya akan sumber daya alam termasuk rempah-rempah yang laku di Timur Tengah.

Namun demikian, dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa tantangan yang cukup signifikan untuk mewujudkan peningkatan ekspor dalam mendorong ekonomi Islam seperti literasi ekspor pada pelaku UMKM kota Bandung yang sangat rendah, pemahaman mengenai perjanjian perdagangan internasional yang masih sangat minim, akses informasi yang tidak menyeluruh, dan berbagai kendala yang ada di lapangan. Tantangan tersebut dapat disimpulkan berasal dari faktor utama yaitu kurangnya sosialisasi perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh *stakeholders* yang menyasar lapisan pelaku usaha sampai pada pelaku UMKM. Literasi ekonomi Islam pada tataran pelaku UMKM juga belum dilakukan secara menyeluruh sehingga sebagai pelaku UMKM tidak menyadari pentingnya sertifikasi halal pada usaha yang mereka jalankan khususnya usaha di bidang kuliner.

Tantangan tersebut harus diatasi dengan cara mengintensifkan sosialisasi perjanjian perdagangan internasional termasuk pelatihan, *workshop*, dan bimbingan teknis bagi para pelaku UMKM yang memiliki potensi untuk menjadi eksportir. Jika tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dapat diatasi dengan baik maka Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi pemain utama dalam pasar global dengan keunggulan komparatif dari berbagai produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM khususnya UMKM kota Bandung yang sudah terkenal sebagai kota dengan tingkat ekonomi kreatif paling tinggi di Indonesia dengan berbagai produk yang mampu bersaing di pasar global.

Ekonomi Islam di kota Bandung sudah berkembang sangat pesat bahkan proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh berbagai lembaga sudah dijalankan

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

secara masif dengan target menyasar pelaku UMKM. Program ini menjadi salah satu keunggulan kota Bandung untuk tinggal landas melakukan ekspor ke pasar PEA dan juga Timur Tengah yang memang menerapkan syarat utama prinsip-prinsip Islam karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Potensi tersebut hanya bisa dimaksimalkan jika terjadi kolaborasi yang erat antar berbagai elemen yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional. Hal yang dikhawatirkan jika negara lain mengambil bahan dari Indonesia kemudian mereka hanya melabeli halal kemudian menjual kembali sehingga negara lain yang mendapatkan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, R. S. (2020). Peningkatan Volume Penjualan Pada Umkm Industri Kreatif Makanan, Minuman Melalui E-Commerce Di Kota Bandung. *Sosiohumaniora*, *22*(2), 172–180.

Amir, A. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Wida Publishing.

Dinata, K. F., Nugraha, R. F., & Fadhli, M. (2024). Pengaruh Perdagangan Internasional dan Ekonomi Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, *5*(2), 13–23.

Dora, Y. M., Saefudin, N., Sari, O. Y., Sakti, I. W., Sudrajat, A., & Sumantri, D. (2024). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bandung Pasca Pandemi Covid 19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(2), 1193–1207.

Dwiputra, R., & Barus, L. S. (2022). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19 di kawasan kampung tangguh pluit-penjaringan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, *18*(1), 26–34.

Faizi, F., & Yudhistira, S. S. Y. S. S. (2023). The Effectiveness Of Sharia Micro-Enterprise Capital Financing On The Development Of Msmes In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(3), 3179–3188.

Free Trade Agreement Center. (2022). *Indonesia dan PEA Capai Babak Akhir Perundingan IUAE–CEPA*. Ftacenter.Kemendag.Go.Id. https://ftacenter.kemendag.go.id/indonesia-dan-pea-capai-babak-akhir-perundingan-iuaecepa

H Muklis Bin Abdul Azis, M. M., Didi Suardi, L., & Ek, M. A. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakad Media Publishing.

Hodijah, C., Kusnara, H. P., & Jaya, U. A. (2023). Pelatihan Strategi E-Commerce Dalam Mengembangkan Keunggulan Daya Saing Produk Usaha bagi Pelaku Bisnis UMKM Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, *4*(3), 627–633.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 6 No 2 (2025) 454 – 471 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v6i2.5644

Kemlu.go.id. (2023). *Ekspor Pertama Indonesia Ke UAE Sukses Dalam Kerangka I-UEA Cepa*. Kemlu.Go.Id. https://www.kemlu.go.id/abudhabi/id/read/ekspor-pertama-indonesia-ke-uae-sukses-dalam-kerangka-i-uae-cepa/2036/important-information

moec.gov.ae. (2023). *UAE-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Https://Www.Moec.Gov.Ae. https://www.moec.gov.ae/en/cepa_indonesia

Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN" Veteran ….

Sidabutar, V. (2014). Peluang dan Permasalahan yang Dihadapi UMKM Berorientasi Ekspor. *Jakarta: Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional*.

UU RI No 20. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. *1*.

Wa'Uina, O. J., Nau, N. U. W., & Seba, R. O. C. (2024). Kepentingan Ekonomi Indonesia melalui Perjanjian Indonesia–Uni Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(8), 5466–5488.

Wahyudi, Y., & Sasongko, G. (2021). *Perdagangan Bilateral Indonesia–Persatuan Emirat Arab (Pea): Pendekatan Intensitas*.

Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. *Mimbar Administrasi*, *18*(1), 1–14.